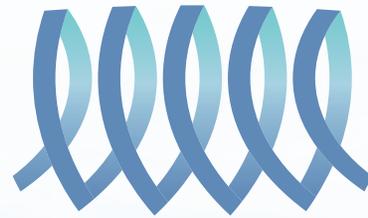




COASTAL500

Panduan Aksi





COASTAL500

Connecting Leaders for Thriving Coastal Communities

Anggota Coastal 500 telah berkomitmen pada prinsip-prinsip utama untuk mendukung perikanan yang sehat dan berkelanjutan. Setiap anggota Coastal 500 mengambil janji publik yang sama untuk membangun masyarakat pesisir yang makmur dan sejahtera.

Buku Panduan Aksi 500 Pesisir menguraikan tindakan program, kebijakan, dan pendanaan khusus yang dapat diambil anggota untuk mendukung setiap janji.



Mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab yang mencakup pendaftaran, pemantauan hasil tangkapan, partisipasi dalam pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan.

1. Memperkenalkan kepada masyarakat luas dan mengakui secara terbuka peran nelayan dalam masyarakat yang menunjukkan perilaku nelayan yang bertanggung jawab dalam komunikasi verbal maupun tertulis.
2. Memberitahukan manfaat dan pentingnya perilaku nelayan yang bertanggung jawab dalam komunikasi lisan di tengah-tengah masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung perilaku nelayan yang bertanggung jawab pada acara-acara sosial atau kebudayaan.
4. Mengalakkan kampanye komunitas untuk pendaftaran nelayan secara kolektif untuk mempromosikan mobilisasi sosial dan pendaftaran nelayan lokal.
5. Menyelenggarakan acara komunitas atau kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan yang berlaku saat ini, pemantauan tangkapan dan/atau pendekatan pengelolaan, dan manfaat terkait dengan keputusan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
6. Menetapkan target pemantauan tangkapan dan/atau pendaftaran nelayan dan mengembangkan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
7. Mengintegrasikan pendaftaran nelayan, pemantauan tangkapan, dan praktik perikanan berkelanjutan lainnya dalam kebijakan, pernyataan, dan/atau peraturan yang terkait.



Berinvestasi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mengembangkan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

1. Memfasilitasi pelatihan untuk jajaran pemerintah kabupaten/kota dan/atau anggota masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat dan kerangka peraturan perikanan.
2. Mendorong staf pemerintah kota untuk mengidentifikasi kesempatan mengikuti pelatihan seputar pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat.
3. Berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan yang dimiliki pejabat/pegawai pemerintah daerah, kepada tokoh masyarakat yang peduli dengan penangkapan ikan yang berkelanjutan, melalui lokakarya atau forum, dan/atau mengartikulasikan secara jelas dan mengupayakan hubungan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang lebih baik dengan tantangan global seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.
4. Melakukan penilaian jasa lingkungan yang disediakan perikanan dan ekosistem, bekerja sama dengan lembaga lokal dan anggota masyarakat lokal, dan mempertimbangkan data iklim.
5. Melakukan penilaian ekonomi atas kontribusi ikan terhadap perekonomian daerah dan dampak keuangan jika tata kelola perikanan dijalankan dengan kurang optimal untuk mendapatkan pertimbangan tentang perlunya pemrioritasan sumber daya keuangan bagi sektor ini.
6. Mengalokasikan dan menganalisis penganggaran untuk kegiatan perikanan pesisir dalam rangka memahami kesenjangan dan peluang untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan alokasi keuangan untuk sektor perikanan.
7. Melakukan penilaian terkait kebijakan, kapasitas dan keuangan untuk memahami kesenjangan dan cara-cara untuk mendukung pengelolaan perikanan lebih lanjut.
8. Melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber pembiayaan (misalnya pembiayaan dari pemerintah, sektor swasta, mitra LSM, pembiayaan inovatif lainnya) untuk meningkatkan investasi dan alokasi dalam pengelolaan perikanan pesisir yang berkelanjutan.
9. Meningkatkan alokasi keuangan untuk pengelolaan perikanan pesisir dalam anggaran yang ada.



Membangun masyarakat yang berdaya dan berwawasan melalui pengelolaan perikanan partisipatif yang mengatur upaya secara adil dan menggunakan proses pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan.

1. Berdialog dengan anggota masyarakat untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dan prioritas mereka untuk pengembangan sistem pengelolaan perikanan.
2. Mendorong partisipasi perwakilan masyarakat dalam ruang pengambilan keputusan dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri wakil-wakil masyarakat untuk membahas proses pengelolaan perikanan dan mendukung tindak lanjut atas saran dan pendapat yang mereka berikan.
3. Mengidentifikasi, mengundang, dan memberdayakan nelayan perempuan untuk terlibat dalam forum pengelolaan perikanan bersama untuk memastikan perspektif mereka terintegrasi dengan baik dalam setiap aksi atau rencana yang relevan.
4. Berkonsultasi dengan tokoh masyarakat atau nelayan yang terkait mengenai laporan dan data tentang keadaan perikanan dan ekosistemnya dan menyajikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
5. Memfasilitasi lokakarya dan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan hak dalam pengelolaan perikanan, yang dapat dilakukan bersama dengan LSM atau lembaga lokal.

Mendukung daerah perlindungan laut untuk mengembalikan dan mempertahankan populasi ikan dengan melindungi habitat pesisir seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun.



1. Mengunjungi daerah perlindungan laut yang ada atau yang sedang diusulkan untuk menunjukkan ketertarikan secara politik kepada masyarakat lokal dan inisiatif mereka.
2. Mendorong alokasi sumber daya untuk pengelolaan perikanan yang efektif, pemantauan dan penegakan aturan daerah perlindungan laut dalam percakapan di forum daerah dan nasional.
3. Mendorong dan secara terbuka mengakui arti penting kepatuhan terhadap peraturan tentang daerah perlindungan laut yang telah ditetapkan dalam acara-acara atau dalam komunikasi tertulis.
4. Mendukung proses pembentukan daerah perlindungan laut di wilayah yang belum memilikinya dengan menyampaikan pernyataan dukungan publik atau memfasilitasi percakapan dengan kelompok yang mendukung pembentukan, termasuk berbagi pelajaran dari pengalaman.
5. Memprioritaskan dan mengakui inisiatif masyarakat lokal dalam membentuk daerah perlindungan laut dengan mendukung masyarakat dalam mengatur secara internal dan memfasilitasi diskusi seputar proses pembentukan daerah perlindungan laut, termasuk pemberian informasi manfaat yang terkait seperti ketahanan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.
6. Mengembangkan, meningkatkan dan/atau melaksanakan kebijakan yang ada atau baru yang menetapkan, memungkinkan, atau mendukung akses pemanfaatan sumber daya perikanan yang terkelola dan daerah perlindungan laut.



Mengakui, memprioritaskan dan menganjurkan kepada masyarakat lokal terkait akses dan pemanfaatan perikanan pesisir.

1. Menekankan arti penting secara perikanan artisanal yang bertanggung jawab dari sisi sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi dan hak akses masyarakat lokal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku melalui kampanye atau penyampaian pesan dalam rencana kerja kelembagaan.
2. Mendukung inisiatif, dialog, dan/atau permintaan di tingkat pemerintah nasional/pusat yang dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya perikanan skala kecil dan memperjelas serta mendukung pemrioritasan akses nelayan kecil terhadap wilayah pesisir.
3. Mempromosikan perikanan pesisir di tingkat daerah dan/atau internasional dengan misalnya mendorong dimasukkannya topik yang berkaitan dengan perikanan skala kecil pada pertemuan pemerintah daerah.
4. Mengakomodasi saran dan masukan dari anggota masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi bagi masyarakat pesisir terkait dengan akses dan pemanfaatan perikanan pesisir.
5. Mengintegrasikan konteks lokal masyarakat pesisir, baik tantangan maupun solusi, ke dalam dokumen atau strategi perencanaan lembaga pemerintah—misalnya alokasi anggaran, rencana pembangunan, strategi iklim—dan bekerja sama dengan para wakil masyarakat untuk menyiapkan dukungan yang diperlukan.
6. Mengembangkan dan/atau mengimplementasikan rencana pemerintah daerah bagi pemulihan dari bencana (misalnya pasca COVID atau pasca bencana) untuk mendukung perikanan pesisir.
7. Mengembangkan kebijakan berbasis sains yang akan membantu mengenali, memprioritaskan, atau mendukung masyarakat lokal dalam mengakses dan menggunakan perikanan pesisir.
8. Mengakses dan menggunakan data ringkasan perikanan bulanan yang ada di portal.rare.org untuk pengambilan kebijakan dan keputusan eksekutif.

Terus-menerus belajar, mengajar dan menginspirasi orang lain, dengan berbagi pelajaran dan pengalaman yang didapatkan dari interaksi dengan masyarakat yang saya pimpin kepada para kepala daerah lain dari Indonesia maupun negara lain.



1. Berpartisipasi dalam pertemuan, acara, atau sesi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Jaringan.
2. Mengembangkan studi kasus atau cerita tentang daerah yang saya pimpin untuk berbagi praktik terbaik, tantangan, dan peluang kepala daerah lain.
3. Melakukan dialog rutin dengan anggota Jejaring lainnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Mengagendakan dialog dengan pemerintah tingkat pusat untuk mendiskusikan isu, solusi dan peluang untuk menggaungkan berbagai upaya dalam perikanan pesisir berkelanjutan berbasis masyarakat.



Coastal 500 (Pesisir 500), suatu inisiatif global yang didukung oleh Rare, adalah jaringan bupati/walikota dan pemimpin pemerintah daerah terbesar yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan masyarakat pesisir yang maju dan sejahtera.

Rare menginspirasi perubahan sehingga masyarakat dan alam dapat berkembang.

Info lebih lanjut dapat dilihat di portal.rare.org dan ikuti @Rare_org.